

# SISTEM MONITORING DATA REHABILITASI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Muhamad Safei<sup>1\*</sup>, Nataniel Dengen<sup>2</sup>, Pohny<sup>3</sup>

Jurusan Teknik Informatika, Universitas Mulawarman

Jl. Penajaman, Gn. Kelua, Samarinda, 75113

E-Mail: safey.amat75@gmail.com<sup>1)</sup>, ndengan@gmail.com<sup>2)</sup>, phony28@gmail.com<sup>3)</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem monitoring data rehabilitasi agar dapat mengoptimalkan kinerja antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur dan Instansi Penerima Wajib Laporan dalam kegiatan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba (residen). Sistem monitoring data rehabilitasi ini berbasis website dengan menggunakan metode System Development Life Cycle model Waterfall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan sistem monitoring data, data rehabilitasi dari Lembaga Penerima Wajib Laporan dapat diintegrasikan ke dalam sistem dengan baik dan memudahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur dalam memantau dan menerima laporan bulanan terkait data residen yang direhabilitasi.

**Kata kunci :** Sistem Monitoring, Data Rehabilitasi, Laporan.

## 1. PENDAHULUAN

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur merupakan instansi vertikal non kementerian berkedudukan di Kota Samarinda yang berperan aktif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Dalam mewujudkan upaya tersebut, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur membentuk 4 bidang, salah satunya adalah bidang Rehabilitasi. Bidang Rehabilitasi adalah bidang bertugas untuk melakukan pengobatan secara medis maupun sosial kepada para korban penyalahgunaan narkoba (residen). Dan anjuran rehabilitasi ini juga telah dibuat dalam Undang-Undang yakni Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. [1].

Untuk mendukung tugas dan fungsi bidang rehabilitasi tersebut, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan beberapa Instansi Penerima Wajib Laporan. Instansi Penerima Wajib Laporan ini berperan dalam melakukan rawat inap dan rawat jalan kepada para korban penyalahgunaan narkoba. Instansi Penerima Wajib Laporan akan memberikan laporan rehabilitasi per bulan ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur menggunakan *email*. Dalam perkembangan tugas dan fungsi Instansi Penerima Wajib Laporan ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur kurang dapat menghimpun informasi dan memonitoring kondisi masing-masing Instansi Penerima Wajib Laporan karena belum adanya sistem yang saling terintegrasi

antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur dan Instansi Penerima Wajib Laporan. Misalnya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur kurang tahu secara pasti jumlah daya tampung yang tersedia di masing-masing Instansi Penerima Wajib Laporan secara rutin. Sebagai contoh, jika ada korban penyalahgunaan narkoba baru, maka Badan Narkotika Nasional harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke setiap Instansi Penerima Wajib Laporan terkait kesediaan dalam menampung korban penyalahgunaan narkoba dan pekerjaan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini merupakan pekerjaan yang kurang efektif dan efisien. Selain itu, pendataan korban penyalahgunaan narkoba pun masih terbilang manual dengan menggunakan kertas dan aplikasi *Microsoft excel*. Untuk itu dianggap perlu adanya monitoring. Menurut Mercy, 2005[2], monitoring didefinisikan sebagai siklus kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan. Defenisi diatas dapat diimplementasikan dalam sebuah sistem yaitu sistem monitoring.

Dengan adanya sistem monitoring data rehabilitasi diharapkan seluruh Insitusi Penerima Wajib Laporan dapat menginputkan data rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba secara cepat, sehingga Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur dengan mudah mendapatkan informasi dan memonitoring rehabilitasi dari masing- masing Instansi Penerima Wajib Laporan. Selain itu, dengan adanya sistem monitoring dapat menjadi pertimbangan dari bidang lainnya dalam menjalankan tugasnya. Misalnya bidang

pengecapan dapat lebih mengetahui sasaran pencegahannya dengan melihat jumlah korban rehabilitasi berdasarkan segmennya (pelajar / mahasiswa, pekerja, dan masyarakat). Begitu pula untuk bidang Pemberantasan akan lebih mengetahui jenis narkoba apa saja yang harus lebih ditekan penyebaran di kalangan masyarakat dengan melihat jumlah korban rehabilitasi berdasarkan jenis narkoba yang digunakannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menganggap perlu adanya sistem yang mampu mengoptimalkan kinerja antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur dan Institusi Penerima Wajib Lapori sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul : “Sistem Monitoring Data Rehabilitasi Institusi Penerima Wajib Lapori Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur”

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Sistem Monitoring

Menurut Jogiyanto, 2005[3], sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.

Menurut Hogwood and Gunn sebagaimana dikutip oleh Nugroho D, 2003[4], monitoring adalah proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang meliputi keterkaitan antara implementasi dan hasil-hasilnya (*outcomes*). Sedangkan menurut Nelly Indriani W & Rani Susanto, 2014[5], monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan atau program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program atau kegiatan itu selanjutnya.

Jadi, sistem monitoring adalah suatu jaringan kerja atau sistem yang melakukan analisis informasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dan menghasilkan umpan balik informasi untuk melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan guna mencapai tujuan yang diinginkan.

### 2.2 Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang – orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Menurut Soeparman, 2000[6], rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba

### 2.3 Institusi Penerima Wajib Lapori

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 [7], Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi

dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

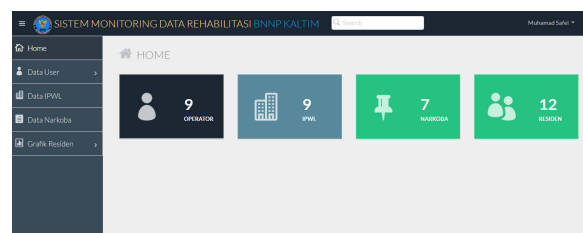
## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur (BNNP Kaltim), pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba (residen) dilakukan oleh Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang terbagi menjadi dua jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi rawat inap dan rehabilitasi rawat jalan. Penentuan layanan rehabilitasi yang akan dijalani oleh residen berdasarkan hasil assesment awal oleh tim ahli dan tingkat kecanduan dari residen itu sendiri. Residen yang menjalani rehabilitasi rawat jalan akan berlangsung selama 1 bulan sedangkan residen yang menjalani rawat inap akan berlangsung selama 3 bulan. Lama rehabilitasi ini dapat berjalan lebih cepat atau lebih lama pelaksanaannya tergantung dari kondisi residen seiring berjalannya rehabilitasi yang dilakukan. BNNP Kaltim juga dapat mengajukan rujukan ke IPWL sesuai dengan kondisi residen. Rujukan tersebut apabila diterima oleh IPWL yang ditunjuk, maka residen tersebut akan menjalani rehabilitasi di IPWL tersebut. Berdasarkan uraian diatas, penulis membangun sistem monitoring data rehabilitasi Institusi Penerima Wajib Lapori pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur dengan hasil sebagai berikut.

#### a. Halaman Admin

Halaman admin menampilkan menu-menu yang akan digunakan oleh admin untuk mengelola data master berupa data user (admin, operator BNNP Kaltim, operator IPWL), data IPWL, dan data Narkoba. Ditunjukkan pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Halaman Admin

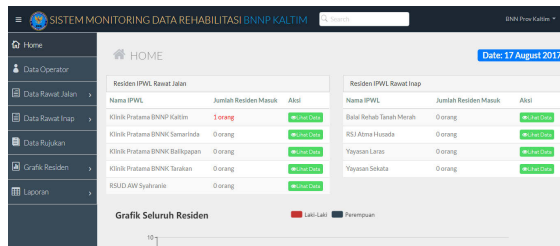
#### b. Halaman Operator BNNP Kaltim

Halaman operator BNNP Kaltim merupakan halaman utama dari sistem yang dibangun. Hal ini dikarenakan operator BNNP Kaltim adalah operator yang melakukan monitoring data rehabilitasi dari masing-masing IPWL

##### 1) Halaman Home

Menu *Home* merupakan tampilan awal operator BNNP Kaltim setelah berhasil login. Halaman ini menampilkan rekapan data rehabilitasi yang masuk masing-masing IPWL setiap harinya serta grafik

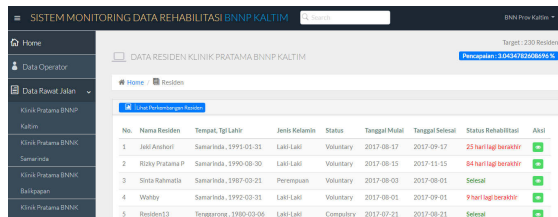
jumlah residen perbulan di seluruh IPWL. Ditunjukkan pada **Gambar 2**.



Gambar 2. Halaman *Home* Operator BNN

## 2) Halaman Data Residen

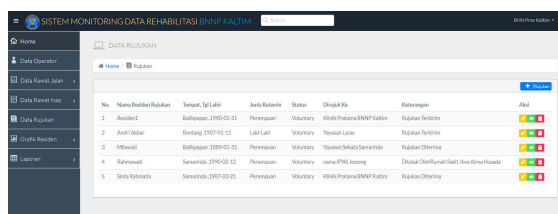
Halaman Data Residen merupakan tampilan dimana operator BNNP Kaltim dapat melihat data residen dari seluruh IPWL yang melayani rehabilitasi. Pada halaman ini akan ditampilkan data residen mulai dari biodata diri residen, pendidikannya, juga narkoba yang digunakannya. Pada tampilan menu ini juga menunjukkan daya tampung dari masing-masing IPWL serta persentase pencapaian rehabilitasi. Disini juga disediakan menu lihat/detail dari masing-masing residen untuk melihat data residen secara keseluruhan. Ditunjukkan pada **Gambar 3**.



Gambar 3. Halaman Data Residen

## 3) Halaman Rujukan

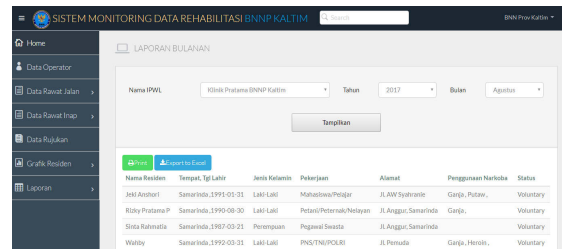
Halaman Rujukan merupakan halaman operator BNNP Kaltim dalam mengelola data rujukan yang akan diserahkan/dirujuk ke IPWL yang terkait. Pada halaman ini akan ditampilkan data rujukan berupa identitas residen, IPWL yang menjadi rujukan serta keterangan rujukan. Ditunjukkan pada **Gambar 4**.



Gambar 4. Halaman Rujukan

## 4) Halaman Laporan Bulanan

Halaman Laporan bulanan merupakan menu yang digunakan oleh operator BNNP Kaltim agar dapat memperoleh laporan bulanan masing-masing IPWL lebih cepat. Ditunjukkan pada **Gambar 5**.

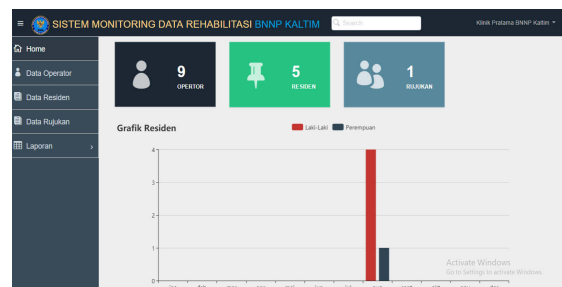


Gambar 5. Halaman Laporan Bulanan

## c. Halaman Operator IPWL

### 1) Halaman *Home*

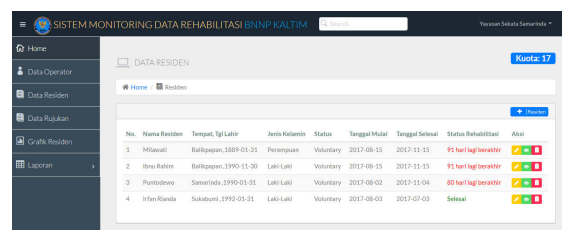
Halaman ini menampilkan grafik jumlah residen perbulan berdasarkan IPWL masing-masing. Ditunjukkan pada **Gambar 6**



Gambar 6. Halaman *Home*

### 2) Halaman Data Residen

Halaman ini merupakan halaman operator IPWL dalam mengelola data residen. Pada halaman ini akan ditampilkan data residen berupa biodata, pendidikan, narkoba yang dikonsumsi, dan lama rehabilitasinya. Data Residen yang dikelola oleh operator IPWL dapat dipantau langsung oleh operator BNNP Kaltim pada halaman Data Residen pada Gambar 3. Halaman Data Residen operator IPWL ditunjukkan pada **Gambar 7**.



Gambar 7. Halaman Data Residen Operator IPWL

### 3) Halaman Rujukan

Halaman Rujukan merupakan halaman operator IPWL yang menampilkan data rujukan yang dirujuk oleh BNNP Kaltim. Pada menu ini, operator IPWL dapat melakukan proses lihat rujukan, terima rujukan dan tolak rujukan. Pada sidebar menu apabila ada rujukan masuk dari BNNP Kaltim maka tampil notifikasi jumlah residen yang dirujuk. Ditunjukkan **Gambar 8**.

No.	Nama Residen Rujukan	Tempat, Tgl Lahir	Jenis Kelamin	Status	Aksi
1	Andi Akbar	Bontang, 1987-05-11	Laki Laki	Voluntary	View Edit Delete
2	Milawati	Balikpapan, 1989-03-31	Perempuan	Voluntary	View Edit Delete

Gambar 8. Halaman Rujukan Operator IPWL

#### 4) Halaman Laporan Bulanan

Halaman Laporan bulanan merupakan menu yang digunakan oleh operator IPWL agar dapat mencetak data rehabilitasi sebagai arsip dan dapat simpan secara *softcopy* Ditunjukkan pada Gambar 9.

Nama Residen	Tempat, Tgl Lahir	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Alamat	Pengawasan Narabita	Status
Jefi Ashraf	Samarinda, 1995-01-21	Laki Laki	Mahasiswa/Praker	Jl. 2002 Syarifudin	Gaung, Jember	Voluntary
Rizky Pratama P	Samarinda, 1990-08-20	Laki Laki	Petani/Peternak/Melayan	Jl. Anggun Samarinda	Gaung	Voluntary
Sinta Rahmatia	Samarinda, 1987-02-21	Perempuan	Pegawai Swasta	Jl. Anggun Samarinda		Voluntary
Wahyuni	Samarinda, 1990-03-31	Laki Laki	PNS/TNI/Polri	Jl. Pemuda	Gaung, Manado	Voluntary

Gambar 9. Halaman Rujukan Operator IPWL

### 3.2 Pembahasan

Sistem Monitoring Data Rehabilitasi Institusi Penerima Wajib Laport merupakan sistem yang diperlukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan kinerja dalam penanggulangan pecandu narkoba. Sistem monitoring ini dibangun untuk mempermudah dalam proses pelaksanaan rehabilitasi residen baik rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap dan BNNP Kaltim dapat memantau secara langsung kondisi residen masing-masing IPWL serta memudahkan dalam proses pembuatan laporan.

Sistem monitoring data rehabilitasi dapat digunakan oleh 3 level pengguna yaitu *Admin*, Operator BNNP Kaltim, dan Operator IPWL. Pada level *Admin*, *Admin* dapat melakukan *login*, input, edit, hapus data operator BNNP Kaltim, data operator IPWL, data narkoba yang sering digunakan, data IPWL, melihat grafik residen seluruh IPWL, dan fungsi *logout*. Pada level operator BNNP Kaltim, operator BNNP Kaltim dapat melakukan *login* untuk melakukan monitoring terhadap data IPWL dari masing-masing IPWL. Operator BNNP Kaltim dapat melihat data residen yang masuk tiap hari dari masing-masing IPWL dan dapat melihatnya secara detail. Selain itu, operator BNNP Kaltim dapat melakukan *input*, *edit*, dan hapus data rujukan, serta memantau apakah rujukan yang telah dikirim ke IPWL telah diterima atau ditolak. Operator BNNP juga dapat melihat data residen masing-masing IPWL secara keseluruhan serta grafiknya, cetak laporan bulanan, dan fungsi *logout*. Pada level Operator IPWL, operator IPWL dapat melihat operator IPWL lainnya, melakukan *input*, *edit*, dan hapus data residen, menerima data rujukan atau

menolak data rujukan, cetak laporan bulanan, dan fungsi *logout*.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis, perancangan, dan pembuatan Sistem Monitoring Data Rehabilitasi Institusi Penerima Wajib Laport Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Monitoring Data Rehabilitasi digunakan untuk pendataan residen oleh masing-masing IPWL
2. Sistem Monitoring Data Rehabilitasi menampilkan informasi kepada BNNP Kaltim terkait jumlah residen masuk per harinya jika terdapat residen baru dari IPWL tertentu
3. Sistem Monitoring Data Rehabilitasi dapat menampilkan data residen dari masing –masing IPWL secara lengkap beserta dengan lama rehabilitasi yang akan dijalani oleh residen secara kontinu.
4. Sistem Monitoring Data Rehabilitasi memberikan informasi rujukan baru kepada IPWL tertentu jika BNNP Kaltim memberikan rujukan kepada IPWL tersebut.
5. Sistem Monitoring Data Rehabilitasi dapat menampilkan grafik jumlah residen perbulan baik secara keseluruhan maupun berdasarkan IPWL masing-masing
6. Dengan adanya sistem ini, BNNP Kaltim maupun IPWL dapat melakukan pengarsipan data rehabilitasi baik secara *hardcopy* maupun *softcopy*.

### 4.2 Saran

Dalam pembuatan Sistem Monitoring Data Rehabilitasi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sistem ini akan lebih baik lagi jika dikembangkan dengan menambahkan user biasa yaitu Orang Tua atau Keluarga residen yang sudah terdata oleh BNNP Kaltim sehingga dapat mengakses sistem dan dapat menerima informasi rehabilitasi yang dijalani oleh residen yang bersangkutan.
2. Sistem ini agar dapat digunakan dengan oleh masing-masing IPWL dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur sehingga dapat mewujudkan Kaltim BERSINAR (Bersih Narkoba)

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- [2] Mercy. 2005. Design, Monitoring and Evaluation Guidebook. Portland, USA.
- [3] HM, Jogyanto.2005. Analisis dan Desain. Yogyakarta. Andi Offset

- [4] W, Nelly Indriani & Susanto, Rani. 2014. Kajian Sistem Monitoring Dokumen Akreditasi Teknik Informatika Unikom, Vol.12, No.2 : 196, (<http://jurnal.unikom.ac.id/volume/vol12>, diakses pada tanggal 20 Juni 2016).
- [5] Hogwood dan Gun, dalam Nugroho D, Riant, (2003). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, PT Elex Media. Komputindo, Jakarta.
- [6] Soeparman, Herman (2000). Narkoba telah merubah rumah kami menjadi neraka, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional-Dirjen Dikti.
- [7] Republik Indonesia. 2009. Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pencandu Narkotika. Sekretariat Negara. Jakarta.
- [8] Havaluddin, Agus Tri Haryono, Dwi Rahmawati. 2016. Aplikasi Program PHP dan MySQL. Mulawarman University Press. ISBN: 978-602-6834-22-5
- [9] Havaluddin. 2011. *Memahami Penggunaan UML (Unified Modelling Language)*; Jurnal INFORMATIKA Mulawarman, Pebruari 2011, Vol. 6, No. 1, pg. 1-14 ISSN: 1858-4853.
- [10] Zakaria, Edy Budiman, Ummul Hairah. 2017. Sistem Informasi Pengelolaan Data Pendaftaran Pasien Pada Rumah Sehat Dompot Dhuafa (RSDD) Kalimantan Timur Secara Digital Berbasis Web. Prosiding 2<sup>nd</sup> SAKTI